

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

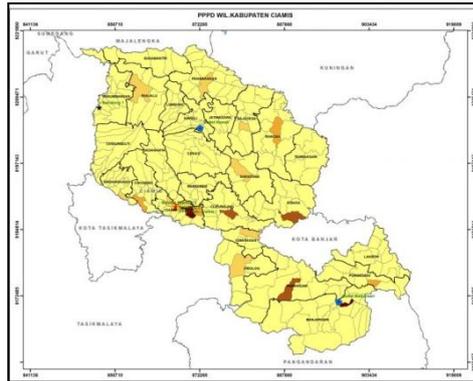
Pemekaran daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat di daerah yang wilayah administrasinya lebih luas. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terpadu di semua tingkatan. Menurut ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian dari daerah yang berdekatan, atau perluasan satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Pada saat yang sama, pemekaran daerah terutama berfokus pada peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan keamanan, dan mencapai pembangunan yang harmonis antara pusat dan daerah.

Sejarah pemekaran daerah di negara Indonesia dapat dibagi dalam beberapa fase, yaitu era awal kemerdekaan (1945 – 1949), era Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950), era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950 – 1998) dan era Reformasi (1999 – sekarang).

Pemekaran di Provinsi Jawa Barat semakin pesat sejak awal reformasi dimulai pada tahun 2000 dimana wilayah Banten kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat berlanjut terhadap pemekaran kabupaten/kotanya diawali dari pemekaran Kota Bekasi dari Kabupaten Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, kemudian Kabupaten Bandung yang memekarkan dua wilayahnya yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Cimahi memekarkan diri dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 dan Kabupaten Bandung Barat memekarkan diri dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Kota Tasikmalaya memekarkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Terakhir, Kabupaten Ciamis yang memekarkan dua wilayahnya yaitu Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar memekarkan diri dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 dan Kabupaten Pangandaran memekarkan diri dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012.

Secara astronomis, Kabupaten Ciamis terletak antara  $108^{\circ}19'$  –  $108^{\circ}43'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}40'30''$  -  $7^{\circ}41'30''$  Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ciamis memiliki batas-batas wilayah yaitu, Utara – Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan; Barat – Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya; Selatan – Kabupaten Pangandaran; dan Timur Kota Banjar dan

Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.597,67 km<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Ciamis dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 124 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Ciamis adalah Kota Tasikmalaya dengan jarak 17,5 km.



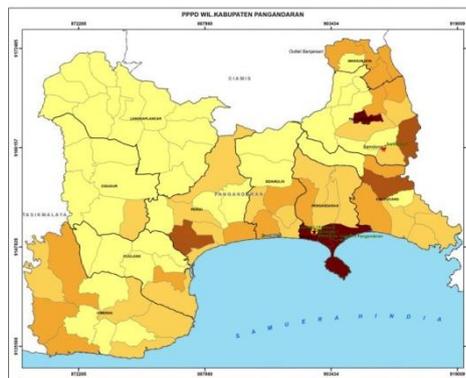
**Gambar 1.1 Peta Kabupaten Ciamis**

Sumber : *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Provinsi Jawa Barat 2022*

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjarsari; Banjaranyar; Lakbok; Purwadadi; Pamarican; Cidolog; Cimaragas; Cijeungjing; Cisaga; Tambaksari; Rancah; Rajadesa; Sukadana; Ciamis; Baregbeg; Cikoneng; Sindangkasih; Cihaurbeuti; Sadanaya; Cipaku; Jatinagara; Panawangan; Kawali; Lumbung; Panjalu; Sukamantri; dan Panumbangan.

Kabupaten Ciamis melakukan pemekaran wilayah pada tahun 2012 dengan membentuk daerah otonom baru yaitu Kabupaten Pangandaran. Pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

Pangandaran adalah sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis sebagai daerah induknya dan sekaligus kabupaten termuda yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak antara 108°30' – 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" – 7°50'20" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pangandaran memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Ciamis; Barat – Kabupaten Tasikmalaya; Selatan Samudra Hindia; dan Timur – Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km<sup>2</sup> dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 211 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 km.



**Gambar 1.2 Peta Kabupaten Pangandaran**

Sumber : *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*

*Provinsi Jawa Barat 2022*

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak; Cijulang; Cigugur;

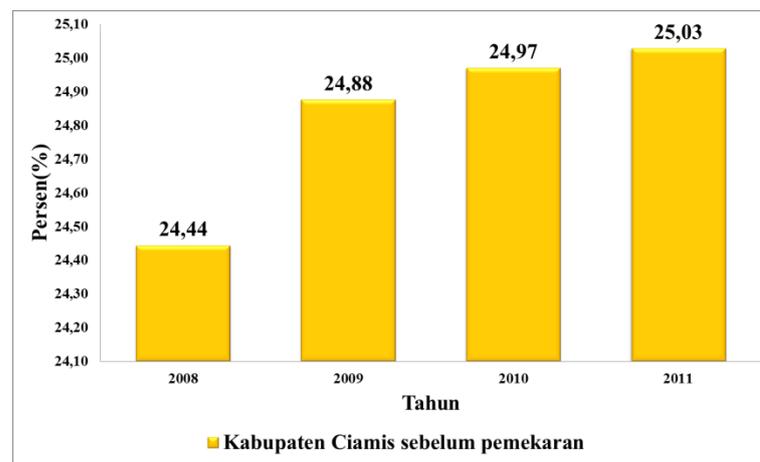
Langkaplancar; Parigi; Sidamulih; Pangandaran; Kalipucang; Padaherang; dan Mangunjaya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah 177,19 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 32,80 km<sup>2</sup>. Dengan ibukota berada pada wilayah Kecamatan Parigi.

Sebagai salah satu kabupaten termuda hasil dari pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran tentunya terus berbenah dalam mengurus rumah tangganya, baik dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan khususnya masyarakat Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Dalam beberapa penelitian terdahulu banyak yang beranggapan bahwa daerah dari hasil pemekaran cenderung tidak mampu bersaing dengan daerah induknya atau tidak mampu menyamai keadaan dengan daerah induknya.

Dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Khususnya dalam menjalankan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kinerja ekonomi, kinerja ekonomi adalah sebuah keadaan dimana kondisi perekonomian yang dibangun oleh sebuah pemerintahan dapat ditunjukkan. Indikator-indikator kinerja ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kontribusi sektor-sektor perekonomian dan sebagainya.

Dalam Indeks kinerja ekonomi daerah ada indikator-indikator yang digunakan yaitu adalah pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, kontribusi PDRB daerah terhadap PDRB provinsi dan angka kemiskinan. Indikator-indikator yang digunakan adalah yang sering digunakan oleh para peneliti dalam melakukan

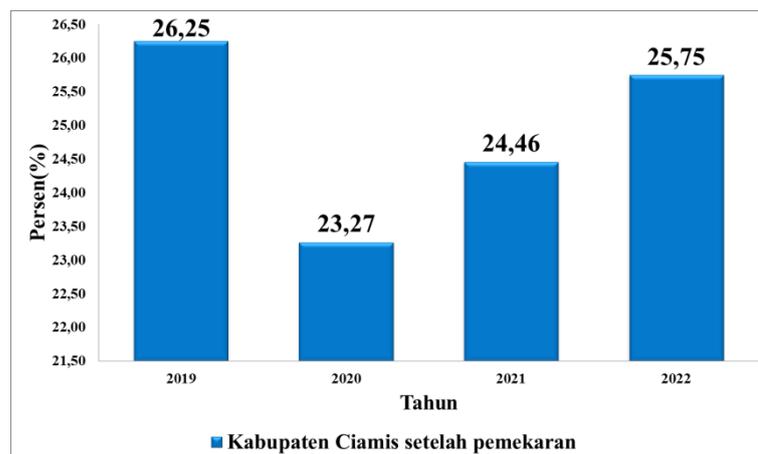
penelitian terkait indeks kinerja ekonomi daerah dan juga bersumber dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga terdapat indikator-indikator yang dapat menjelaskan hasil kinerja pemerintah daerah dalam substansi yang lainnya.



**Gambar 1.3 Indeks Kinerja Ekonomi  
Kabupaten Ciamis Sebelum Pemekaran**

Sumber: *Dokumen pribadi (diolah)*

Dilihat dari Gambar 1.3 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Ciamis Sebelum Pemekaran. Indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis sebelum pemekaran pada tahun tahun 2008 berada pada nilai 24,44 persen dan terus meningkat pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2011 sebelum Kabupaten Ciamis memekarkan Kabupaten Pangandaran indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis berada pada nilai 25,03 persen.



**Gambar 1.4 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran**

Sumber: *Dokumen pribadi (diolah)*

Dilihat dari Gambar 1.4 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran. Indeks Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran pada tahun 2019 berada pada nilai 26,25 persen dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan nilai indeks kinerja ekonomi menjadi 23,27 persen, penurunan nilai indeks kinerja ekonomi pada tahun 2020 terjadi sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 nilai indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis kembali membaik dengan meningkat menjadi 24,46 persen dan sampai pada akhir tahun 2022 kembali meningkat dengan berada pada nilai indeks kinerja ekonomi kabupaten ciamis menjadi 25,75 persen.



**Gambar 1.5 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Pangandaran**

Sumber: *Dokumen pribadi (diolah)*

Dilihat dari Gambar 1.5 Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Pangandaran. Indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 berada pada nilai 27,39 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai indeks kinerja ekonomi menjadi 22,58 persen, hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 nilai indeks kinerja ekonomi mengalami peningkatan dengan berada pada nilai 23,75 persen dan terus meningkat hingga pada akhir tahun 2022 nilai indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran berada pada nilai 26,15 persen.

Penelitian tentang kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah hasil pemekaran sudah banyak dilakukan. Secara umum, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, apakah dengan pemekaran daerah tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran mengalami peningkatan dari sebelumnya atau sama bahkan mengalami penurunan dari sebelumnya pada waktu masih bergabung dengan daerah induk.

Teori federasi fiskal generasi kedua (Musgrave dan Oates) lebih menekankan pada pentingnya revenue dan *expenditur assignment*. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berpengaruh pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, contohnya dalam penetapan keputusan investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Oates, dalam keadaan pasar barang dan jasa yang mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa-jasa publik. Persaingan antar pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun jika peraturan pemerintah daerah dan penyedia barang atau jasa publik tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan perpindahan faktor produksi ke daerah lain dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam laporan yang dibuat oleh BAPPENAS (2008), landasan evaluasi pemekaran wilayah ditentukan berdasarkan tujuan atau rencana awal dari pemekaran itu sendiri. Berdasarkan tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Oleh karena itu, indikator evaluasi pemekaran daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemekaran adalah kinerja ekonomi daerah, yang ditunjukkan dengan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah.

Hasil penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPENAS) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) (2008) menyimpulkan bahwa daerah-daerah hasil pemekaran secara umum tidak berada dalam kondisi yang baik dibandingkan dengan daerah induk atau daerah kontrol. Namun setelah lima tahun hasil pemekaran, kondisi daerah otonom baru juga secara umum tetap masih berada di bawah kondisi daerah induk. Tingkat kemiskinan daerah otonom baru memang mengalami penurunan namun justru terkonsentrasi di daerah otonom baru tersebut.

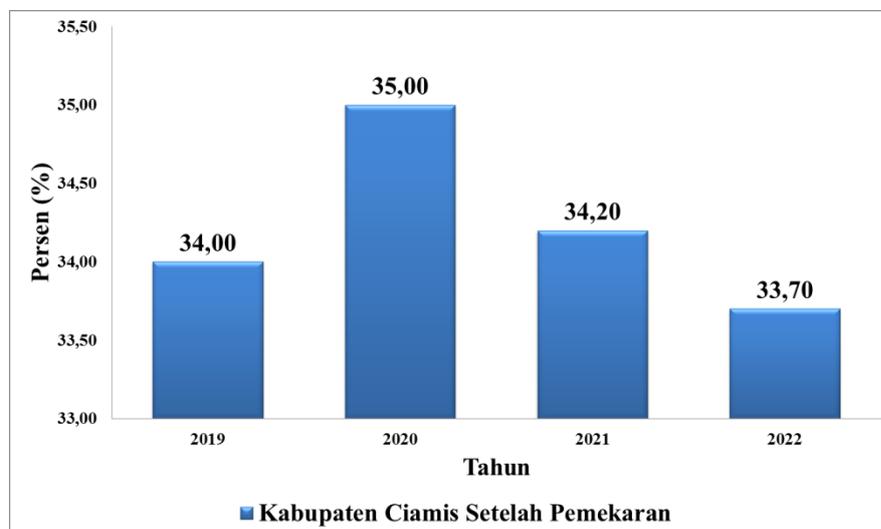
Menurut Pradana, R. S. (2022) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kinerja ekonomi daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah induk dibandingkan dengan daerah hasil pemekarannya yaitu Aceh Jaya, Nagan Raya dan Simeulue adalah kinerja ekonomi daerah induk yang masih lebih baik dibandingkan daripada kinerja ekonomi daerah hasil pemekaran. Dilihat dari pertumbuhan PDRB daerah hasil pemekaran yang masih berada di bawah tingkat pertumbuhan PDRB daerah induk namun, pertumbuhan PDRB pada daerah pemekaran menunjukkan kenaikan pada tiap tahunnya.

Hakim et al., (2017) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa aspek kinerja perekonomian daerah secara umum untuk kabupaten hasil pemekaran belum mampu dalam menyaingi kinerja perekonomian daerah induknya. Menjelaskan bahwa dampak dari pemekaran wilayah untuk daerah hasil pemekaran belum menunjukkan hasil yang positif bagi pembangunan perekonomian daerah tersebut.

Secara umum, pemekaran suatu wilayah adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik khususnya pada faktor dan indikator dalam rangka pembentukan daerah

otonom baru yang berdampak terhadap pembangunan daerah pemekaran tersebut. Oleh karena itu kemampuan perekonomian daerah setelah pemekaran perlu dikaji untuk melihat sejauh mana pemekaran berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kabupaten induk dan kabupaten hasil pemekaran itu sendiri dengan menggunakan analisis kinerja ekonomi daerah.

Selain melihat perbandingan indeks kinerja ekonomi daerah, dalam penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dari indeks kinerja ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Ketimpangan ekonomi yang diukur dengan menggunakan rasio gini, rasio gini adalah ukuran ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah.



**Gambar 1.6 Rasio Gini Kabupaten Ciamis**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat dari Gambar 1.6 Rasio Gini Kabupaten Ciamis. Rasio gini Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 berada pada nilai 34,00 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 35,00 persen, peningkatan terjadi karena

adanya pandemi *Covid-19*. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai rasio gini menjadi 34,20 persen dan terus menurun nilainya hingga pada tahun 2022 nilai rasio gini berada pada nilai 33,70 persen.



**Gambar 1.7 Rasio Gini Kabupaten Pangandaran**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat dari Gambar 1.7 Rasio Gini Kabupaten Pangandaran. Rasio gini Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 berada pada nilai 31,00 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 33,50 persen, peningkatan nilai rasio gini disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 nilai rasio gini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 32,00 persen dan sampai pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan kembali nilai rasio gini menjadi 29,40 persen.

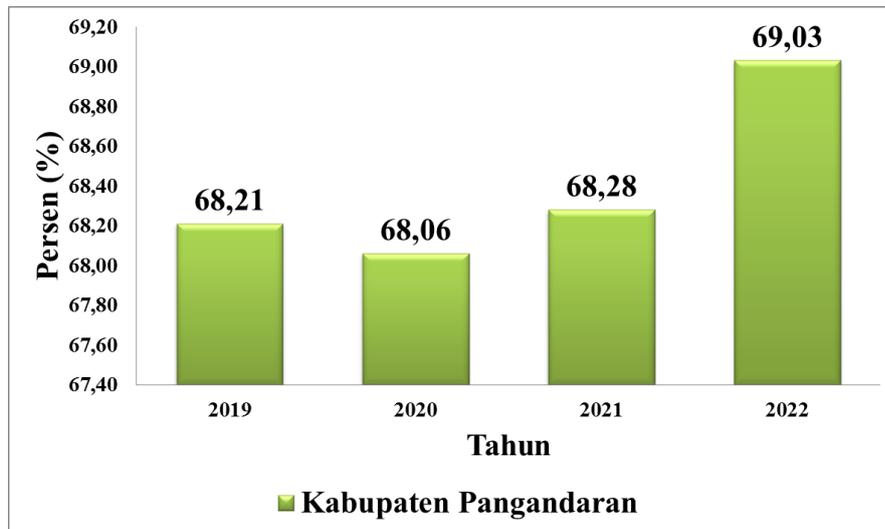
Indeks pembangunan manusia adalah suatu ukuran yang dipakai guna mengukur kemajuan dan kualitas hidup suatu negara atau wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar kualitas hidup.



**Gambar 1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat dari Gambar 1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 berada pada nilai 70,39 persen dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,49 persen. pada tahun 2021 indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis meningkat menjadi 70,93 persen dan pada akhir tahun 2022 indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis meningkat menjadi 71,45 persen.



**Gambar 1.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat dari Gambar 1.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 berada pada nilai 68,21 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai indeks pembangunan manusia menjadi 68,06 persen. Pada tahun 2021 nilai indeks pembangunan manusia kembali meningkat menjadi 68,28 persen dan terus meningkat hingga akhir tahun 2022 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pangandaran berada pada nilai 69,03 persen.

Secara umum, pemekaran suatu wilayah adalah untuk perubahan ke arah yang lebih baik khususnya pada faktor dan indikator dalam rangka pembentukan daerah otonom baru yang berdampak terhadap pembangunan daerah pemekaran tersebut. Oleh karena itu kemampuan perekonomian daerah setelah pemekaran perlu dikaji untuk melihat sejauh mana pemekaran berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kabupaten induk dan kabupaten hasil pemekaran itu sendiri dengan menggunakan analisis kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan uraian

latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KINERJA EKONOMI KABUPATEN CIAMIS DAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Sebelum dan Setelah Pemekaran)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis sebelum pemekaran dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
2. Bagaimana perbandingan antara indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran sebagai kabupaten induk dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten hasil pemekaran?
3. Bagaimana pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran terhadap rasio gini Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
4. Bagaimana pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
5. Bagaimana pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran terhadap rasio gini Kabupaten Pangandaran?
6. Bagaimana pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Pangandaran?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis sebelum pemekaran dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
2. Untuk mengetahui perbandingan antara indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran sebagai kabupaten induk dengan indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten hasil pemekaran?
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran terhadap rasio gini Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Ciamis setelah pemekaran terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Ciamis setelah pemekaran?
5. Untuk mengetahui pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran terhadap rasio gini Kabupaten Pangandaran?
6. Untuk mengetahui pengaruh indeks kinerja ekonomi Kabupaten Pangandaran terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Pangandaran?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu kegunaan untuk ilmu pengetahuan dan kegunaan praktis.

### **1.4.1 Kegunaan Ilmu Pengetahuan**

Memberikan pengetahuan mengenai evaluasi kebijakan otonomi daerah dan pemekaran daerah dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal kinerja ekonomi daerah.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, dengan adanya kegiatan penelitian ini yang dijadikan sebagai suatu pengalaman yang berharga dalam upaya peningkatan kemampuan penulis dalam menambah ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan dapat memberikan informasi mengenai dampak kinerja ekonomi daerah Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten hasil pemekaran.
2. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan dasar penelitian lanjutan bagi pengembangan pembelajaran menanggapi isu pemekaran daerah.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada data sekunder yaitu berupa publikasi laporan pertumbuhan produk domestik regional bruto atas harga konstan menurut lapangan usaha, produk domestik regional bruto per kapita, kontribusi produk domestik regional bruto kabupaten/kota terhadap produk domestik regional bruto provinsi, angka kemiskinan, rasio gini dan indeks pembangunan manusia dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Agustus 2022, dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan/Program Studi Ekonomi Pembangunan.

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																
2.	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																
3.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan usulan penelitian																

No	Kegiatan	Tahun 2022															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Seminal usulan penelitian																
No	Kegiatan	Tahun 2023															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Revisi usulan penelitian dan persetujuan revisi																
6.	Pengumpulan dan pengelolaan data																
7.	Prosen bimbingan untuk menyelesaikan skripsi																
8.	Ujian skripsi, revisi skripsi dan pengesahan skripsi																

Sumber: *Dokumen pribadi*